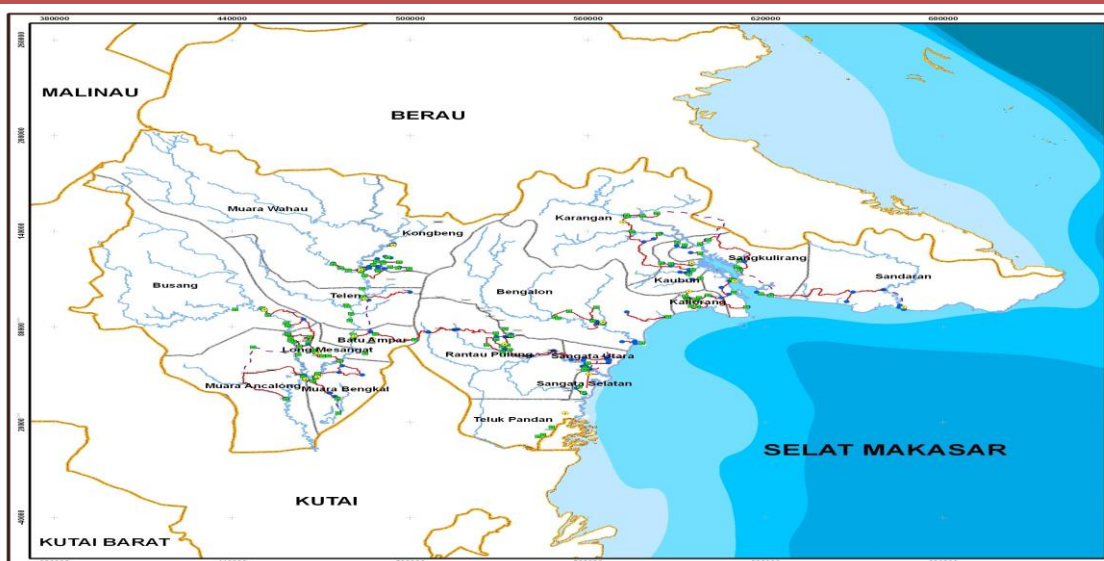


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



SANGATTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021– 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kutai Timur, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 menindaklanjuti revisi yang dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Sangatta, 4 September 2023

Kepala Pelaksana,



Dr. H. M. Idris Syam, S.K.M. M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690912 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar dan Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Landasan Hukum	I - 2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
	1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II - 7
	2.2. Sumber Daya BPBD	II - 9
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	II - 9
	2.2.2 Aset / Modal	II - 10
	2.3. Kinerja Pelayanan BPBD	II - 33
	2.4. Tantangan dan Peluang	II - 36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	III - 38
	3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal	III - 38
	3.1.2. Analisa Faktor Lingkungan Eksternal	III - 40
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 41
	3.3. Telaahan Restra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	III - 42
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 43
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD	V - 53
	5.2. Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah	V - 56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	
	6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	VI - 59
	6.2. Program Penanggulangan Bencana	VI - 62
	6.3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	VI - 66
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 99
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 103

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	2.1.	Gambar Struktur BPBD Kutai Timur	9
Tabel	2.2.1	Daftar Pegawai BPBD Kutai Timur	10
Tabel	2.2.2	Sarana dan Prasarana Kerja BPBD Kutai Timur	11
Tabel	2.2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kutai Timur Tahun 2016-2018	34
Tabel	4.1	Tujuan, Sasaran BPBD Kutai Timur Terhadap Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD	52
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	55
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPBD Kutai Timur	67
Tabel	7.1	Indikator Kinerja BPBD kutai Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD); b. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); dan c. rencana pembangunan tahunan.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan karena menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD pada setiap tahun anggaran. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada

keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai Respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang - undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Terbatasnya prasarana dan sarana, sumberdaya manusia baik kuantitas dan kualitas, dan anggaran merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kutai Timur ini disusun berdasarkan landasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Permendagri No. 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuta Timur tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Maksud :

- a) Memberikan arah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan;

- b) Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.

2. Tujuan :

- a) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- b) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan;
- c) Memberikan acuan kepada BPBD Kabupaten Kutai Timur untuk berkoordinasi terhadap perangkat pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kabupaten Kutai Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Tujuan
- 5.2. Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

- 6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6.2. Program Penanggulangan Bencana
- 6.3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana Badan, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berfungsi menyelenggarakan pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana urusan pemerintahan bidang penanganan penanggulangan bencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kutai Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai **Tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana, meliputi Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat Bencana, Rehabilitasi dan Rekontruksi secara adil dan merata.**

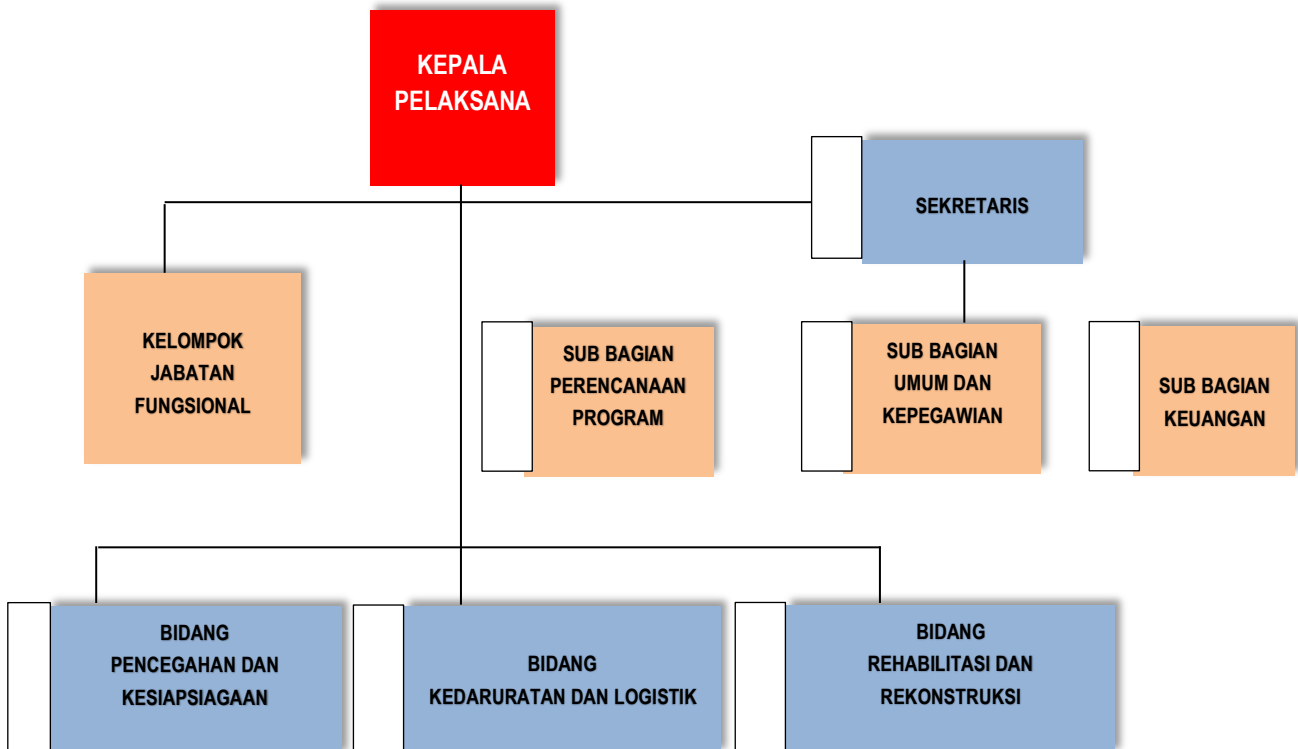
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR



2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten kutai Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non PNS, terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 33 Orang, (berdasarkan tingkat pendidikan) , yaitu :

- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 5 Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 19 Orang
- Diploma : 0 Orang
- Pendidikan SLTA / SMU : 9 Orang
- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang
- Pegawai Non PNS, berjumlah 64 orang
- Pegawai PPPK, berjumlah 5 orang

Tabel. 2.2.1 Daftar Pegawai BPBD Kabupaten Kutai Timur

DAFTAR PEGAWAI BPBD KAB KUTAI TIMUR														
NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				PENDIDIKAN						
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Pelaksana	1		1				1						
2	Sekretaris	1		1						1				
3	Kasubag Umum	1			1					1				
4	Staff Bagian Umum	7	8		2	3				8		7		
5	Kasubbag Keuangan													
6	Staf Sub Bag Keuangan	3	3		2					5		1		
7	Kasubbag Perencanaan Program													
8	Staf Subbag Perencanaan Program	3	4		3					5		2		
9	Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan	1		1				1						
12	Staf Bid Pencegahan & Kesiapsiagaan	14	9	1	5	1		1	15		7			
13	kabid Kedaruratan & Logistik	1		1				1						
16	Staf Bid Kedaruratan & Logistik	23	5		4	7			16		12			
17	Kabid Rekonstruksi & Rehabilitasi		1	1				1						
20	Staf Bid Rekonstruksi & Rehabilitasi	8	8		3	1			10		6			
	Jumlah	63	38	6	20	12	0	1	4	61	0	35	0	0
	PPPK	3	2											
	NON PNS	37	27											
	PNS	24	9											
	Jumlah PNS	33												
	Jumlah Non PNS	64												
	Jumlah PPPK	5												
	Total	102												

2.2.2 Aset/ Modal

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Kutai Timur berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah BNPB.

Tabel. 2.2.2
 Sarana & Prasarana Kerja BPBD
 Kabupaten Kutai Timur
 Per Desember 2022

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	0	m ²
2	Gedung	1	Unit (1 lantai)
		0	m ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Ruang Arsip	0	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Gudang	2	Area

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur selengkapnya pada tabel berikut :

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	VOLUME		SUMBER PEROLEHAN		TAHUN PENGADAAN	KONDISI			KET
				JUMLAH	INSTANSI		RUSAK	SEDANG	BAIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	KENDARAAN :									
1	ISUZU	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	08/08/2019 00:00:00.000	-	2	-	MOBIL PATROLI KARHUTLA, POOL
2	HINO	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	15/08/2019 00:00:00.000	-	1	-	Kec. Muara Wahau
3	HINO	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	15/08/2019 00:00:00.000	-	1	-	Kec. Sangkulirang
4	HINO	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	15/08/2019 00:00:00.000	-	1	-	Kec. Muara Bengkal
6	ISUZU	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	15/08/2019 00:00:00.000	1	2	-	Kec. Muara Bengkal
7	VIAR	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000	-	3	7	Up Informasi 2020 MOTOR CYCLE PEMADAM, POOL

8	Mobil Rescue Komando	-	UNIT	-			-	-	-	
9	Mobil Rescue	1	UNIT	-	Bantuan BPNB		-	-	-	Bantuan BPNB
10	Mobil Ambulance	-	UNIT	-			-	-	-	
11	Mobil Serbaguna	1	UNIT	-	Bantuan BPNB		-	-	-	
12	mobil Tangki WTP	-	UNIT	-			-	-	-	
13	Mobil Dapur Umum	-	UNIT	-			-	-	-	
14	Mobil Tangki Air	-	UNIT	-			-	-	-	
15	Mobil Komunikasi Satelit	-	UNIT	-			-	-	-	
16	Mobil Toilet / MCK	-	UNIT	-			-	-	-	
17	Motor Trail	-	UNIT	-			-	-	-	
18	Mobil Dalmas	-	UNIT	-			-	-	-	
19	Mobil Logpal (Panther)	-	UNIT	-			-	-	-	
20	Mobil PMK Roda 3	-								
	MOBIL OPERASIONAL JABATAN									
21	TOYOTA FORTUNER	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	08/05/2020 00:00:00.000	-		1	
22	Toyota Rush	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	2014	-	1	-	
23	Toyota Avansa	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	2013	-		2	
	MOBIL OPERASIONAL LAPANGAN									
24	Mobil Toyota Hilux Doble Cabin	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	2013	1	-	-	
25	Mobil Toyota Hilux Single Cabin	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	2013	1	-	-	
26	Mobil Patroli Hilux Double Cabin	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	12/04/2020	-	-	4	

						00:00:00.000				
27	Mobil Hilux Singe Cabin	13	UNIT	13	BPBD KUTIM	08/12/2020 00:00:00.000	-	-	13	
28	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) HINO	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	09/03/2020 00:00:00.000		1	2	
29	Hilux Double Cabin	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	08/12/2021 00:00:00.000			6	
30	Hilux Sigle Cabin	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	08/12/2021 00:00:00.000			1	
31	HILUX DOUBLE CABIN/GUN25DCM/T20	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	11/02/2022 00:00:00.000			4	
32	Mitsubishi/SC	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	12/08/2022 00:00:00.000			4	
33	HINO/TRUCK	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	12/07/2022 00:00:00.000			4	
	MOTOR DINAS OPERASIONAL									
34	Honda Supra	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	27/05/2013 00:00:00.000			5	
35	Honda Mega Pro	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/05/2013 00:00:00.000		1	-	
36	Honda Vario	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/05/2013 00:00:00.000	1		-	
37	Honda CB150R	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	27/05/2013 00:00:00.000			2	
38	Yamaha Jupiter MX King	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	17/03/2016 00:00:00.000			1	
39	Sepeda Motor Honda CRF 150	68	UNIT	68	BPBD KUTIM	18/09/2020 00:00:00.000			68	
40	Sepeda Motor Patroli Honda CRF 150	18	UNIT	18	BPBD KUTIM	08/12/2021			18	

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	VOLUME		SUMBER PEROLEHAN		TAHUN PENGADAAN	KONDISI			KET
				JU ML AH	INSTANSI		RUS AK	SE DA NG	B AI K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	HUNIAN:									
	1 Tenda 5 X 7 METER	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	23/11/2022 00:00:00.000			10	
	2 Veld Bed	180	UNIT	180	BPBD KUTIM	12/01/2022 00:00:00.000			180	
	3 Tenda 4X6	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	12/09/2022 00:00:00.000			10	
	4 Tenda Posko :									
	- Tenda Posko Lama	2	UNIT					2		Hibah
	- Tenda Posko Baru		UNIT							
	5 Tenda Pleton	4	UNIT				2	2		
	6 Tenda Regu	2	UNIT				2			
	7 Tenda Keluarga									
	- Tenda Keluarga Lama	8	UNIT				8			
	- Tenda Keluarga 4x4 M	15	UNIT						15	
	- Tenda Keluarga Baru									
	9 Tenda Pengungsi	4	UNIT				3	1		
	10 Tenda Kanvas	4	UNIT					4		
III	ALAT KOMUNIKASI:									
	1 Radio HT Handy Talky (HT) ICON	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	03/01/2013 00:00:00.000	5			
	2 Handy Talky (HT) ICON	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000	1			
	3 Wireless	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	10/11/2015 00:00:00.000	1			

	4	Wireless Amplifier	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/01/2013 00:00:00.000			1	
	5	Radio RIG YEASU	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/05/2016 00:00:00.000			1	
	6	BALDEN 9913	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000	1			
	7	AMPHENOL	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000	1			
	8	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000	1			
	9	Handy Talky (HT) ICON	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000		2	4	
	10	Rotary Coler	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000	1			
	11	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000		1	1	
	12	Antene MF/MW Portable	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000	20			
	13	Handy Talky (HT) ICOM	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000	3		17	
	14	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	17	UNIT	17	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000			17	
	15	Handy Talky (HT) ALINCO	70	UNIT	70	BPBD KUTIM	10/07/2020 00:00:00.000	3	7	60	
	16	GPS GARMIN	15	UNIT	15	BPBD KUTIM	25/02/2020 00:00:00.000			15	
	17	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	25/02/2020 00:00:00.000	1			
	18	Radio RIG Alinco Dr 735	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000	5			
	19	GPS Receiver	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	18/08/2020 00:00:00.000	2			
	20	Alinco DR-735 TA	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	13/12/2021 00:00:00.000	2			
	21	DJI PHATOM	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000				
IV		PERAHU :									
	1	Perahu Karet	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	20/12/2022 00:00:00.000			1	
	2	Pelampung Life Jacket	8	UNIT	8	BPBD KUTIM	19/12/2022 00:00:00.000			8	
	3	Perahu Karet	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			1	
	4	Perahu Lipat	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			2	
		- Kapasitas 8 Orang									

	- Kapasitas 10 Orang	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			1	
	- Kapasitas 12 Orang	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			1	
	- Kapasitas 10 Orang Silinger	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			1	
5	Body Speedboat (Fiber)									
	Spead Boad (Fiber)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/12/2014 00:00:00.000	1			
6	Body SpeedBoad (Fiber) +									
	Mesin Tempel Mercory 150 PK	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	27/12/2014 00:00:00.000	2			
7	Mesin Perahu									
	- 25 PK	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000		1		
	- 30 PK	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000		1		
	- 18 PK	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			1	
	- 9,8 PK	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000		1	1	
8	Perahu Polyetellin Kap. 6 org + 12 Pelampung + 4 Dayung	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	27/10/2013 00:00:00.000			2	
9	Perahu Amphibi									
V	Genset :									
1	Krisbow 500 Watt	1	UNIT	1	BPBD KUTIM			1		
2	Krisbow 500 Watt	1	UNIT	1	BPBD KUTIM			1		
3	Genset 1,2 KW	1	UNIT	1	BPBD KUTIM			1		
4	Genset 10 KA	1	UNIT	1	BPBD KUTIM			1		
5	Genset 5 KVA	1	UNIT	1	BPBD KUTIM		1			
6	Genset Light Tower Portable Stamford									
NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	VOLUME	SUMBER PEROLEHAN		TAHUN	KONDISI			KET	
			JU ML	INSTANSI		PENGADAAN	RUS AK	SE DA		B AI

				AH				NG	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	<i>Alat Penerangan :</i>									
1	Senter	16	UNIT	16	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000	16	-	-	
2	Automatic Emergency Light	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000	5	-	-	
3	Lampu	17	UNIT	17	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000	17	-	-	
4	Flood Light	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	11/11/2021 00:00:00.000	1	-	-	
6	Lampu Saklar									
7	Kabel Listrik									
8	Lampu Senter									
9	Solar Lamp (Lampu Penerangan									
10	Solar Handle Lamp Senter HID Search Light									
11	Senter HID Search Light	2	UNIT	2	BPBD KUTIM		2			
VII	<i>WATER TREATMENT PORTABLE</i>									
VIII	<i>Peralatan Lainnya :</i>									
1	Lemari Penyimpan	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	3			
2	Papan Nama Instansi	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000			1	
3	Meja Rapat	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	2			
4	Kursi Biasa	17	UNIT	17	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	17			
5	Meja 1/2 Biro	50	UNIT	50	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	50			
6	Kipas Angin	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	2	2		
7	Dispenser	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	2			

8	Gorden 1 Paket	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	1			
9	Tandon Air	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000		2		
10	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	28/09/2012 00:00:00.000	5			
11	Handy Cam	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/01/2013 00:00:00.000	1			
12	P.C Unit	7	UNIT	7	BPBD KUTIM	31/12/2013 00:00:00.000	7			
13	Lap Top	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	06/05/2013 00:00:00.000	2			
14	Hardisk dan Plasdiks	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/12/2013 00:00:00.000	1			
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	06/05/2013 00:00:00.000	4			
16	Televisi	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/12/2013 00:00:00.000	1			
17	A.C. Window	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2013 00:00:00.000	1			
18	Papan Pengumuman	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/12/2013 00:00:00.000		1		
19	Brandkas	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/05/2013 00:00:00.000	1			
20	Lemari Kaca	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	31/12/2013 00:00:00.000	2			
21	Alat Penghancur Kertas	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	06/05/2013 00:00:00.000	1			
22	Filing Cabinet Besi	9	UNIT	9	BPBD KUTIM	06/05/2013 00:00:00.000	4	5		
23	Camera Video	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	03/01/2013 00:00:00.000	2			
24	Layar Film/Projector	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	05/02/2013 00:00:00.000	1			
25	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/12/2013 00:00:00.000	1			
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	02/06/2014 00:00:00.000	6			
27	Hard Disk	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	02/06/2014 00:00:00.000	4			
28	Lap Top	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	03/07/2014 00:00:00.000	3			
29	P.C Unit	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	02/05/2014 00:00:00.000	3			
30	Lemari Kayu	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	04/01/2014 00:00:00.000	6			
31	Filing Cabinet Besi	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	04/01/2014 00:00:00.000	4			

32	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	04/01/2014 00:00:00.000	2		
33	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	03/05/2014 00:00:00.000	2		
34	Server	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/01/2014 00:00:00.000	1		
35	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	14/04/2015 00:00:00.000			
36	BOX APAR	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000		20	
37	Buffet Kaca	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000	1		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000	1		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000	3		
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	UNIT	7	BPBD KUTIM	06/03/2015 00:00:00.000	7		
41	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	06/03/2015 00:00:00.000	1		
42	Monitor	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	06/03/2015 00:00:00.000	2		
43	TECH TITAN	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	19/10/2015 00:00:00.000	1		
44	SANDISK	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	09/11/2015 00:00:00.000	1		
45	Hard Disk	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	06/03/2015 00:00:00.000	4		
46	LOGITECH	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/05/2015 00:00:00.000	1		
47	P.C Unit	6	UNIT	6	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000	6		
48	Figura	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	09/11/2015 00:00:00.000	20		
49	Televisi	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	14/04/2015 00:00:00.000	1		
50	Alat Penghancur Kertas	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	19/10/2015 00:00:00.000	1		
51	Filing Cabinet Besi	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	18/02/2015 00:00:00.000	2		
52	Scanner (Universal Tester)	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	24/05/2015 00:00:00.000	3		
53	P.C Unit	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	20/01/2016 00:00:00.000	1		
54	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	20/03/2016 00:00:00.000	1		
55	Lemari Besi/Metal	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	20/03/2016 00:00:00.000	1		

56	Hard Disk	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	21/03/2016 00:00:00.000	3			
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	UNIT	8	BPBD KUTIM	21/03/2016 00:00:00.000	8			
58	P.C Unit	8	UNIT	8	BPBD KUTIM	21/03/2016 00:00:00.000	8			
59	Hard Disk	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	28/03/2016 00:00:00.000	3			
60	Lemari Besi/Metal	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	17/03/2016 00:00:00.000	1			
61	Global Positioning System	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/05/2016 00:00:00.000	-		1	
62	DJI PHATOM	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/04/2016 00:00:00.000	1			
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/03/2016 00:00:00.000	1			
64	P.C Unit	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/12/2016 00:00:00.000	1			
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/12/2016 00:00:00.000	1			
66	Lap Top	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	16/03/2017 00:00:00.000	1			
67	P.C Unit	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	31/03/2017 00:00:00.000	1			
68	Hard Disk	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	31/03/2017 00:00:00.000	2			
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	15/03/2017 00:00:00.000	1			
70	Filing Cabinet Besi	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	20/03/2017 00:00:00.000	2			
71	Lemari Penyimpan	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	20/03/2017 00:00:00.000	1			
72	Lap Top	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	28/02/2018 00:00:00.000			1	
73	P.C Unit	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	22/11/2018 00:00:00.000		1		
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	22/11/2018 00:00:00.000		1		
75	POMPA GENDONG	65	UNIT	65	BPBD KUTIM	21/11/2018 00:00:00.000			65	
76	Bak Air	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	21/11/2018 00:00:00.000			4	2.000 liter
77	Alat Penghancur Kertas	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	02/08/2019 00:00:00.000			1	
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	25/02/2019 00:00:00.000			1	
79	A.C. Window	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000			1	

80	Televisi	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		1	
81	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		5	
82	Kursi Tamu	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		3	
83	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		3	
84	Filing Cabinet Besi	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		2	
85	Lemari Besi/Metal	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		1	
86	Rak-Rak Penyimpan	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/08/2019 00:00:00.000		1	
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	20/05/2019 00:00:00.000		3	
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	20/05/2019 00:00:00.000		3	
89	P.C Unit	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	21/10/2019 00:00:00.000		3	
90	Lap Top	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	21/10/2019 00:00:00.000		1	
91	Pompa Gendong	120	UNIT	120	BPBD KUTIM	05/11/2019 00:00:00.000		120	
92	Pompa Kebakaran/Portable	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	05/11/2019 00:00:00.000		2	
93	Selang	40	UNIT	40	BPBD KUTIM	05/11/2019 00:00:00.000		40	
94	Sambungan Selang	8	UNIT	8	BPBD KUTIM	27/09/2019 00:00:00.000		8	
95	Topeng (masker) Oxigen	50	UNIT	50	BPBD KUTIM	19/09/2019 00:00:00.000		50	
96	Cangkul Garu	100	UNIT	100	BPBD KUTIM	19/09/2019 00:00:00.000		100	
97	Baju Anti Panas	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	08/01/2019 00:00:00.000		10	
98	Sepatu Karet	100	UNIT	100	BPBD KUTIM	08/01/2019 00:00:00.000		100	
99	Kopling Vanderhadan	25	UNIT	25	BPBD KUTIM	22/08/2019 00:00:00.000		25	
100	Kopyok Api	100	UNIT	100	BPBD KUTIM	22/08/2019 00:00:00.000		100	

101	Penampung Air Portable	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	23/10/2019 00:00:00.000			10
102	Nozzel Gun	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	23/10/2019 00:00:00.000			20
103	Drone	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
104	Secure	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
105	Garmin	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			2
106	invocuse	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
107	Karcer	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
108	Kamera Merk Canon ML50	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
109	Miyako	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
110	FORTUNA PRODUK	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
111	DAT	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			1
112	toa	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	24/10/2019 00:00:00.000			2

113	Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)	19	UNIT	19	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000			19	
114	Meja Tambahan	19	UNIT	19	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000			19	
115	Kursi Biasa	19	UNIT	19	BPBD KUTIM	16/10/2019 00:00:00.000			19	
116	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	75	UNIT	75	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			75	
117	Helmet	64	UNIT	64	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			64	
118	Sekop	72	UNIT	72	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			72	
119	Tangki Air	39	UNIT	39	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			39	
120	Sepatu Boot	62	UNIT	62	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			62	
121	Sarung Tangan Pelindung	72	UNIT	72	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			72	
122	Masker	146	UNIT	146	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			146	
123	Pakaian Pelindung	68	UNIT	68	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			68	
124	Selang Air	234	UNIT	234	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			234	

125	pompa lainnya (dst)	89	UNIT	89	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			89
126	Gepyok Pemadam	105	UNIT	105	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			105
127	Nozel Kuningan Pernekel	81	UNIT	81	BPBD KUTIM	12/04/2020 00:00:00.000			81
128	Pompa Jinjing GXH 50 Honda	21	UNIT	21	BPBD KUTIM	12/07/2020 00:00:00.000			21
129	Pompa Punggung Jetspray	82	UNIT	82	BPBD KUTIM	12/07/2020 00:00:00.000			82
130	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	16	UNIT	16	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			16
131	Personal Komputer lainnya	23	UNIT	23	BPBD KUTIM	25/02/2020 00:00:00.000			23
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	UNIT	26	BPBD KUTIM	11/02/2020 00:00:00.000			26
133	Televisi	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	10/03/2020 00:00:00.000			4
134	Camera Video	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	10/03/2020 00:00:00.000			2
135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	18/08/2020 00:00:00.000			2
136	Meja Kerja Kayu	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	25/02/2020 00:00:00.000			30

137	External/ Portable Hardisk	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	18/02/2020 00:00:00.000			2
138	Sirine	17	UNIT	17	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			17
139	Treng Air/Tandon Air	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	12/03/2020 00:00:00.000			2
140	Meja 1/2 Biro	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			20
141	Meja Rapat	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	10/12/2020 00:00:00.000			4
142	Kursi Kerja Pejabat lainnya	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			20
143	Kursi Tamu	40	UNIT	40	BPBD KUTIM	10/12/2020 00:00:00.000			40
144	Kursi Besi/Metal	38	UNIT	38	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			38
145	Kursi Rapat	24	UNIT	24	BPBD KUTIM	10/12/2020 00:00:00.000			24
146	Filing Cabinet Besi	8	UNIT	8	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			8
147	Lemari Besi/Metal	8	UNIT	8	BPBD KUTIM	10/12/2020 00:00:00.000			8
148	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	11/12/2020 00:00:00.000			4

149	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23	UNIT	23	BPBD KUTIM	30/11/2020 00:00:00.000			23
150	Papan Visual/Papan Nama	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	30/11/2020 00:00:00.000			3
151	Mesin Fogging	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	10/02/2020 00:00:00.000			5
152	Mesin Pompa air PMK	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			1
153	Baju Anti Panas	70	UNIT	70	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			70
154	pompa lainnya (dst)	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	12/10/2021 00:00:00.000			10
155	Selang Tekanan Tinggi	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	21/10/2021 00:00:00.000			20
156	Tangki Air	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			4
157	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	12/10/2021 00:00:00.000			30
158	Sekop	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	23/10/2021 00:00:00.000			30
159	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	23/10/2021 00:00:00.000			20
160	Nozel Kuningan Pernekel	18	UNIT	18	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			18

161	Sarung Tangan Pelindung	40	UNIT	40	BPBD KUTIM	23/10/2021 00:00:00.000			40
162	Nozel Tabir Alumunium	10	UNIT	10	BPBD KUTIM	12/11/2021 00:00:00.000			10
163	Gepyok Pemadam	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			20
164	Blade Shovel (Sekop Pemadam)	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			20
165	Nozzle Tester	15	UNIT	15	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			15
166	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	18/10/2021 00:00:00.000			20
167	Selang Air	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	12/10/2021 00:00:00.000			30
168	Hard Disk	7	UNIT	7	BPBD KUTIM	11/10/2021 00:00:00.000			7
169	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	11/10/2021 00:00:00.000			5
170	Note Book	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	06/10/2021 00:00:00.000			1
171	LCD Projector/Infocus	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	11/11/2021 00:00:00.000			1
172	Mesin Kertas	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	11/11/2021 00:00:00.000			2

173	Serial Printer	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	14/12/2021 00:00:00.000			1	
174	Lap Top	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	14/12/2021 00:00:00.000			4	
175	Personal Komputer lainnya	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	14/12/2021 00:00:00.000			2	
176	Layar Proyektor	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	08/11/2021 00:00:00.000			1	
177	Alat Studio Lainnya	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	03/11/2021 00:00:00.000			1	
178	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	03/11/2021 00:00:00.000			2	
179	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	02/11/2021 00:00:00.000			2	
180	Filing Cabinet Kayu	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	05/11/2021 00:00:00.000			1	
181	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	23/09/2021 00:00:00.000			1	
182	Mesin Barcode	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/11/2021 00:00:00.000			1	
183	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	04/11/2021 00:00:00.000			1	
184	Nozzle Tester	100	UNIT	100	BPBD KUTIM	21/10/2022 00:00:00.000			100	

185	Nozel Kuningan Pernekel	120	UNIT	120	BPBD KUTIM	21/10/2022 00:00:00.000			120
186	Fire House/Tritor Rubber 1,5 Inc x 20 Meter	270	UNIT	270	BPBD KUTIM	21/10/2022 00:00:00.000			270
187	Pompa Air SAN FIRE/8HP 2 TAK	13	UNIT	13	BPBD KUTIM	25/10/2022 00:00:00.000			13
188	Gergaji Chain Saw	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	10/11/2022 00:00:00.000			30
189	Mesin Pompa air PMK SAN FIRE/13 HP	20	UNIT	20	BPBD KUTIM	12/07/2022 00:00:00.000			20
190	Gepyok Pemadam	200	UNIT	200	BPBD KUTIM	12/01/2022 00:00:00.000			200
191	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	148	UNIT	148	BPBD KUTIM	10/11/2022 00:00:00.000			148
192	Helmet	340	UNIT	340	BPBD KUTIM	12/01/2022 00:00:00.000			340
193	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	148	UNIT	148	BPBD KUTIM	12/01/2022 00:00:00.000			148
194	Blade Shovel (Sekop Pemadam)	100	UNIT	100	BPBD KUTIM	12/01/2022 00:00:00.000			100
195	SAN FIRE/PISTOL PEMADAM	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	12/01/2022 00:00:00.000			30
196	Pompa Kebakaran/Portable	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	30/11/2022 00:00:00.000			3

197	Selang Tekanan Tinggi 2,5 Inchi	30	UNIT	30	BPBD KUTIM	30/11/2022 00:00:00.000			30
198	Fire Hose/Piercing 1,5 Inchi	36	UNIT	36	BPBD KUTIM	12/07/2022 00:00:00.000			36
199	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	23	UNIT	23	BPBD KUTIM	12/09/2022 00:00:00.000			23
200	Baju Anti Panas	55	UNIT	55	BPBD KUTIM	12/07/2022 00:00:00.000			55
201	pompa lainnya (dst) 1,5 inci	12	UNIT	12	BPBD KUTIM	12/09/2022 00:00:00.000			12
202	Blade Shovel (Sekop Pemadam)	48	UNIT	48	BPBD KUTIM	12/09/2022 00:00:00.000			48
203	sepatu lapangan lainnya (dst)	211	UNIT	211	BPBD KUTIM	12/05/2022 00:00:00.000			211
204	External/ Portable Hardisk	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	15/08/2022 00:00:00.000			4
205	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	UNIT	1	BPBD KUTIM	13/09/2022 00:00:00.000			1
206	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	26/07/2022 00:00:00.000			2
207	Lemari Penyimpan	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	19/12/2022 00:00:00.000			3
208	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	UNIT	4	BPBD KUTIM	15/08/2022 00:00:00.000			4

	209	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	UNIT	5	BPBD KUTIM	26/10/2022 00:00:00.000			5	
	210	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	UNIT	2	BPBD KUTIM	15/11/2022 00:00:00.000			2	
	211	Lap Top	3	UNIT	3	BPBD KUTIM	25/10/2022 00:00:00.000			3	

Sumber: Data Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Timur Tahun 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur. Khususnya dalam pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Timur.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Kutai Timur melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, mengarah pada :

- (1). Pra Bencana;
- (2). Tanggap Darurat Bencana;
- (3). Pasca Bencana

Program yang telah ditetapkan di tahun 2016-2021 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, pada saat ini kondisi di Kabupaten Kutai Timur diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemukiman penduduk, banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menjadi bencana tahunan di Kabupaten Kutai Timur serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang pada Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur yakni dalam rangka penyiapan penguatan kapasitas kawasan di daerah dalam menyelenggarakan berbagai program penanggulangan bencana kedepan yang sejalan dengan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai UU RI No. 24 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian pelayanan dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kutai Timur.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Mengembangkan sistim penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kutim
Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IK K	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)				70	0	50	0	0	70	0	50	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana (%)				99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat lihat bahwa ;

1. Pada indikator 1 untuk penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal, realisasi tahun 2016 sebesar 0 %, tahun 2017 sebesar 0 %, dan tahun 2018 sebesar 0 %, tahun 2020 dengan target 100 %. Tahun 2020 sebesar 0 % Tidak ada peningkatan yang signifikan karena pelaksanaan kegiatan terkendala pada tidak

tersedia anggaran dan SDM yang tidak memadai untuk penyelesaian dokumen kajian risiko bencana dari tahun 2016, 2017 sampai dengan tahun 2020.

2. Pada indikator 2 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana realisasi tahun 2015 sebesar 70 %, dengan capaian sebesar 100 % sesuai yang ditargetkan. Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan, kegiatan di tahun 2015 menggunakan anggaran dari BNPB dan APBD BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA)

Tahun 2016-2022

Kabupaten/Kota	DESTANA	Tahun Pembentukan	Sumber Dana
Kutai Timur	1. Desa Sepaso	2015	APBD BPBD Prov. Kaltim
	2. Desa Margo Mulyo	2015	APBD BPBD Prov. Kaltim
	3. Desa Sangata Selatan	2015	APBN
	4. Desa Swarga Bara	2015	APBN
	5. Desa Singa Gembara	2017	APBN
	6. Desa Sangkima	2017	APBN
	7. Desa Teluk Pandan	2017	APBN

3. Analisis keberhasilan pada indikator 3 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal dengan capaian 100 % sesuai target yang direncanakan, Sinergitas dengan Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha dalam menyelesaikan dokumen Renkon Banjir dan pelaksanaan gladi lapang bencana banjir tahun 2014.
4. Capaian Sasaran Strategis 3 untuk indikator “Prosentase Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana (%)”, sebesar dapat terealisasi sebesar 99,90 %.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana, belum adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, belum adanya dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pasca Bencana,
- b. Belum optimalnya penanggulangan bencana disebabkan oleh, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang ada, dan belum adanya dukungan pemenuhan kuantitas kebutuhan Sumber Daya Manusia di lapangan.

2.4 Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Kabupaten Kutai Timur selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur, Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan risiko bencana. Hyogo Framework for Action (HFA), yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, setiap wilayah di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia.

Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang

khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Perubahan siklus alam atau fenomena alam, serta perlakuan terhadap lingkungan tentu berdampak dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan alam tersebut. Permasalahan umum kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah :

1. Kondisi alam Kabupaten Kutai Timur yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis beragam merupakan wilayah yang rawan bencana dan permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya.
2. Penanganan kejadian bencana masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien.
3. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.
4. Terbatasnya prasarana sarana, sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga anggaran untuk penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional di bidang penanggulangan bencana;

- b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Tersedianya anggaran penanggulangan bencana yang mencukupi;
- d. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab. Pemimpin yang kuat mampu mengambil keputusan dengan tegas yang artinya harus menerimatanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan konsekuensi yang ditimbulkan. Tidak hanya itu, kemampuan untuk menindaklanjuti juga berperan penting yaitu mampu melihat konsekuensi dari keputusan manajerial sampai akhir dan menerima tanggung jawab penuh untuk tim.

2. Kelemahan

- a. Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya ego sektoral diantara bidang-bidang, masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang diembankan kepada bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di

- lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Masih rendah pemberian penghargaan (*reward*) bagi sumberdaya manusia yang berprestasi dibidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (*punishment*) dari pimpinan terhadap bawahan yang dipimpinya bagi sumberdaya manusia yang melalaikan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada bawahan;
 - c. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
 - d. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahan iklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - e. Belum optimalnya fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta masih lambatnya penyampaian pelaporan kepada pimpinan secara berjenjang.

3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan stakeholder-stakeholder mitra penanggulangan bencana meliputi dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- b. Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan website penanggulangan bencana;
- c. Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan bencana;
- d. Adanya Program Kegiatan prioritas Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur.

2. Ancaman

- a. Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- b. Beratnya medan dan susahnya akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- d. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tahapan awal untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah dengan melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Timur 2021 - 2026 telah merumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026 yaitu: “**Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**”. Visi Kabupaten Kutai Timur Sejahtera untuk semua dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu,
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian,
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata,
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi,
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah terletak pada penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Timur 2021 - 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tujuan 1 (Satu) yaitu **Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata** yang ditempatkan pada misi ketiga,

yakni: **”MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA.”**

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:
(1) masih kurangnya upaya dalam rangka mendorong penggunaan anggaran APBN sebagai dana pendamping kegiatan yang didanai oleh anggaran belanja APBD. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi -312- Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan

Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi RTRW Kabupaten Kutai Timur terhadap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Kabupaten Kutai Timur. Perlu segera disusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kutai Timur yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan.

Terkait dengan telaahan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) berkenaan dengan risiko penurunan kualitas lingkungan hidup, KLHS RPJMD juga memotret permasalahan sosial dan lingkungan hidup sesuai indikator yang bersesuaian terkait kebencanaan, diantaranya pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 12 (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Beberapa hal yang menyebabkan masih kurang optimalnya dalam penanganan bencana yaitu antara lain :

- 1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007;

- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Bidang bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan meningkatkan intensitas bencana alam;
- 4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
- 5) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi di Kabupaten Kutai Timur, maka risiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu, 1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan 2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.

BPBD Kabupaten Kutai Timur terhadap hasil telaahan menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dan ketidakmampuan dalam mengintegrasikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) dengan Dokumen, karena Banyak Dokumen - dokumen penanggulangan bencana yang belum disusun.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2021-2026 antara lain :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana,

pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur;

- c) Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;
- d) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- e) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- f) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas; Menyelesaikan rencana penanggulangan bencana yang didasarkan pada kajian risiko bencana dan mengintegrasikan kedalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b) Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;

- c) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
 - d) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
 - e) Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota/Povinsi, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
3. Bidang Logistik dan Peralatan, Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- f) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
 - g) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan, Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
 - h) Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

Dari uraian analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur, maka isu-isu strategi yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, kurangnya penerapan basis data dalam kebijakan kebencanaan,** hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;
(2) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.
3. **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya**, frekuensi bencana yang meningkat, perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat terhadap bencana dan dampaknya, serta arah mindset pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai timur dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan serta Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Perangkat Daerah selama lima (5) tahun. Tujuan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi pembangunan daerah yaitu

Visi

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkesesuaian dengan tugas dan pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Misi 3 (Tiga) yaitu

“MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

Sedangkan tujuan RPJMD yang berkesesuaian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Tujuan 1 (satu) yaitu:

“ Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata”

Dengan sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan /
Pemukiman, melalui, *Indikator : Indeks Risiko Bencana*

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan dan sasaran RPJMD tersebut di atas, maka tujuan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah;

“Mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang Profesional”

Dengan sasaran :

Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten, melalui *Indikator :*
Indeks Resiko Bencana.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target sasaran dalam 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET CAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN
2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang Profesional.	Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten	Penurunan Indeks Risiko Bencana	188	185	170	160	150	140
2	Terwujudnya Tata Kelola di Bidang Penanggulangan Bencana yang Akuntabel	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Nilai Sakip						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan BPBD merupakan hasil dari indentifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan unternal dan eksternal tersebut serta sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Permerintah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun 5 (Lima) Tahun, meliputi :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Strategi :

- a) Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana;
- b) Mengembangkan sistem penanggulangan berbasis masyarakat;

Kebijakan :

- a) Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
- b) Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- d) BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;

2. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan

Strategi :

- a) Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat;
- b) Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;

Kebijakan :

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Timur;
- b) Pemenuhan Logistik Penanggulangan Bencana;
- c) Peningkatan SDM dalam Penanggulangan Bencana;
- d) Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e) Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien;
- f) Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana;
- g) Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Strategi :

Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana.

Kebijakan :

- a) Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- b) Terlaksananya Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- c) Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana;
- d) Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
- e) Terselenggaranya monitorig dan evaluasi pascabencana;
- f) Penguatan mekanisme dukungan pemulihan pada skala nasional dan daerah;
- g) Pemaduan penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana;
- h) Optimalisasi rehabiltasi dan rekontruksi pada seluruh bidang;

i) Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat siaga bencana

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	: Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua		
Misi	: Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional Dan Merata		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang Profesional	Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana; 2. Mengembangkan sistem penanggulangan berbasis masyarakat; <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat; 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan; 3. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Kutai Timur; 3. Tersusunnya Dokumen Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta kebutuhan Pascabencana; 4. Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai standar Pelayanan; 5. Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan Efisien; 6. Pembentukan karakter dan Ketahanan masyarakat siaga

			<p>bencana</p> <p>7. Pemaduan Penyelenggaraan Pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana;</p> <p>8. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;</p> <p>9. Peningkatan Asesment Penanggulangan Bencana pada Komunitas masyarakat desa mandiri.</p>
--	--	--	---

5.2. Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten meliputi:

- 1. Kegiatan Pelayanan Evakuasi Korban Bencana, paling sedikit memuat :**
 - a) Penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - b) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

- 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;**
 - a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b) pembuatan rencana kontinjensi;
 - c) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;

f) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

- a) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
- b) Respon cepat darurat bencana;
- c) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai langkah operasionalisasi strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi dan misi Bupati Kutai Timur serta tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Kemudian untuk mewujudkan dari beberapa strategi dalam mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD Kutai Timur yang akan dilaksanakan dalam lima (5) tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi dan misi Bupati Kutai Timur serta tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Berikut program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur yang disusun untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Timur. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 kemudian diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan meliputi antara lain:

Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Kabupaten Kutai Timur, Sekretariat pada Subbag Umum, Subbag Penyusunan Program dan Subbag Keuangan ;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antarlain :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, subkegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Fasilitasi Kunjungan Tamu
3. Penyediaan Bahan Logistik kantor
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9. Pemeliharaan Mebel
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
6. Pengadaan Aset Tak Berwujud
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2021 - 2026, adalah:

6.2.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :

1. **Penyusunan Kajian Risiko Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. **Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

6.2.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. **Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
4. **Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5. **Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6. **Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7. **Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
8. **Penyusunan Rencana Kontijensi**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
9. **Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
10. **Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
11. **Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

6.2.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan

2. **Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
3. **Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
4. **Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
5. **Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
6. **Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
7. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan

6.2.4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
2. **Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
3. **Kerjasama antar Lembaga Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
4. **Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan**, pelaksana Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;

5. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
6. **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
7. **Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
8. **Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
9. **Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
10. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
11. **Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
12. **Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota**, Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil (DBH SDA Kehutanan-DR) bersumber dari KLHK.

Pembiayaan indikatif rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	SATUAN INDIKATOR SASARAN	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RENSTRA SKPD		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Mewujudkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang Profesional	Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	IRB		Program 1																		
				1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Resiko Bencana	185 IRB	2,000,115,236	170 IRB	6,450,000,000	160 IRB	5,000,000,000	160 IRB	4,750,000,000	140 IRB	4,500,000,000	140 IRB	4,000,000,000	140 IRB	2,000,115,236	
							Kegiatan 1 :																
							Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Informasi Rawan Kebencanaan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1,600,000,000	2 Dokumen	950,000,000	2 Dokumen	650,000,000	2 Dokumen	550,000,000	2 Dokumen	600,000,000	2 Dokumen	4,350,000,000	
							Sub Kegiatan 1 :			0			1,600,000,000		950,000,000		650,000,000		550,000,000		600,000,000		4,350,000,000

							1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	2,250,000,000
							2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	0	350 Orang	600,000,000	200 Orang	450,000,000	150 Orang	400,000,000	100 Orang	300,000,000	100 Orang	350,000,000	900 Orang	2,100,000,000

					Kegiatan 2 :															
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	15 Kelompok Masyarakat/Aparatur	0	15 Kelompok Masyarakat/Aparatur	2,900,000,000	18 Kelompok Masyarakat/Aparatur	2,700,000,000	20 Kelompok Masyarakat/Aparatur	2,250,000,000	20 Kelompok Masyarakat/Aparatur	2,250,000,000	20 Kelompok Masyarakat/Aparatur	1,950,000,000	20 Kelompok Masyarakat/Aparatur	12,050,000,000
					Sub Kegiatan 2 :		0	0	2,900,000,000		2,700,000,000		2,250,000,000	0	2,250,000,000	0	1,950,000,000		11,850,000,000	
					1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2,300,000,000

							2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	0	20 Kawasan	500,000,000	20 Kawasan	400,000,000	19 Kawasan	500,000,000	20 Kawasan	500,000,000	20 Kawasan	500,000,000	101 Kawasan	2,400,000,000
							3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	0	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	Laporan	250,000,000	Laporan	250,000,000	Laporan	250,000,000	3 Laporan	1,350,000,000

				4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	0	10 Unit	200,000,000	10 Unit	350,000,000	30 Unit	300,000,000	25 Unit	300,000,000	20 Unit	250,000,000	85 Unit	1,400,000,000
				5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	4 Kegiatan	0
				6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	0	1 Kawasan	200,000,000	1 Kawasan	200,000,000	1 Kawasan	200,000,000	2 Kawasan	200,000,000	2 Kawasan	200,000,000	6 Kawasan	1,000,000,000
				7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	0	30 Orang	300,000,000	30 Orang	300,000,000	35 Orang	250,000,000	35 Orang	250,000,000	30 Orang	200,000,000	190 Orang	1,300,000,000

				8. Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	800,000,000
				9. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	0	50 Orang	200,000,000	50 Orang	200,000,000	100 Orang	300,000,000	100 Orang	300,000,000	100 Orang	300,000,000	450 Orang	1,300,000,000
				10. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				11. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	20 Keluarga	100,000,000	20 Keluarga	100,000,000	60 Keluarga	0	70 Keluarga	0	50 Keluarga	0	220 Keluarga	0
				Kegiatan 3 :															

				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	200,115,236	100%	1,700,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,250,000,000	100%	8,950,115,236
				Sub Kegiatan 3 :			200,115,236		1,700,000,000		1,100,000,000		1,500,000,000		1,400,000,000		1,250,000,000		6,700,115,236
				1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0
				2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	0	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000

							3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	0	10 Orang	400,000,000	300,000,000	50 Orang	300,000,000	40 Orang	250,000,000	35 Orang	200,000,000	155 Orang	1,450,000,000
							4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	0	500 Orang	500,000,000	300,000,000	500 Orang	300,000,000	500 Orang	350,000,000	500 Orang	300,000,000	2500 Orang	1,750,000,000
							5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	0	1 Laporan	400,000,000	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	0	1 Laporan	0

				Kegiatan 4 :															
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0	1 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	350,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	1,350,000,000
				Sub Kegiatan 4 :			0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	350,000,000	0	300,000,000	0	200,000,000	0	1,150,000,000
				1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				2. Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				3. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	700,000,000

					4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	0
					5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	0	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	450,000,000
					6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	20 Orang	0	20 Orang		20 Orang		20 Orang		15 Orang		15 Orang		85 Orang	0

						7. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	
						8. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0		0				3 Dokumen		0

							9. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
										0		0		0		0		0		0	

						10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		
									0		0		0		0		0		0	
						11. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
									0		0		0		0		0		0	

							12. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen			
Terwujudnya Tata Kelola di Bidang Penanggulangan Bencana yang Akuntabel	Terperuhnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Administrasi	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Nilai Sakip				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RENSTRA SKPD		
								Program 2 :																
				1	05	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	7,342,776,566	100%	9,850,000,000	100%	11,800,000,000	100%	11,600,000,000	100%	11,850,000,000	100%	12,400,000,000	100%	64,842,7756,566	

				Kegiatan 1 :															
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	177,538,950	100%	150,000,000	100%	300,000,000	100%	200,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	1,827,538,950
				Sub Kegiatan 1 :			177,538,950		150,000,000		300,000,000		200,000,000		500,000,000		500,000,000		1,727,538,950
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	74,311,800	2 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	774,311,800
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	150,000,000

				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	103,227,150	1 Laporan	50,000,000	3 Laporan	100,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	803,227,150
				5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	12 Laporan	0

				6. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
				7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
				Kegiatan 2 :																
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,223,894,681	100%	8,800,000,000	100%	9,200,000,000	100%	9,250,000,000	100%	9,250,000,000	100%	9,250,000,000	100%	9,250,000,000	51,973,894,681
				Sub Kegiatan 2 :			6,223,894,681		8,800,000,000		9,200,000,000		9,250,000,000		9,250,000,000		9,250,000,000		51,973,894,681	

				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4,638,307,401	38 Orang/bulan	6,000,000,000	38 Orang/bulan	0,000,000,000	38 Orang/bulan	0,000,000,000	38 Orang/bulan	0,000,000,000	38 Orang/bulan	0,000,000,000	38 Orang/bulan	34,638,307,401
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68 Dokumen	1,246,692,780	68 Dokumen	2,500,000,000	68 Dokumen	5,000,000,000	68 Dokumen	5,000,000,000	68 Dokumen	5,000,000,000	68 Dokumen	5,000,000,000	68 Dokumen	13,746,692,780
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	295,742,600	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	2,245,742,600
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	43,151,900	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	693,151,900

				5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0	4 Laporan	50,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	650,000,000
				6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0
				Kegiatan 3 :															
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	43,130,600	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	493,130,600

				Sub Kegiatan 3 :															
				1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43,130,600	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	493,130,600
				4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0

				6. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0		
				Kegiatan 4 :															
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%		100%	100,000,000	100%		100%		100%	100,000,000	200,000,000	
				Sub Kegiatan 4 :			0				100,000,000		0		0		100,000,000	200,000,000	
				1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	0	
				2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	1 Paket	0	8 Paket	100,000,000	4 Paket	0	2 Paket	0	1 Paket	100,000,000	1 Paket	200,000,000

				3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
				5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	50 Orang	0	20 Orang	0	20 Orang	0
				6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	Orang	0	Orang	0	46 Orang	0	20 Orang	0	20 Orang	0	20 Orang	0

				7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	Orang	0	Orang	0	20 Orang	0	15 Orang	0	10 Orang	0	10 Orang	0
				Kegiatan 5 :															
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	554,190,035	100%	200,000,000	100%	800,000,000	100%	750,000,000	100%	700,000,000	100%	600,000,000	100%	3,604,190,035
				Sub Kegiatan 5 :			554,190,035		200,000,000		800,000,000		750,000,000		700,000,000		600,000,000		3,604,190,035
				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	178,505,050	10 Paket	100,000,000	20 Paket	300,000,000	15 Paket	250,000,000	15 Paket	200,000,000	10 Paket	100,000,000	80 Paket	1,128,505,050
				2. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	6 Laporan	0
				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	375,684,985	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	6 Laporan	2,475,684,985

				4. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	6 Dokumen	0
				5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	6 Dokumen	0
				6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	20 Paket	0	20 Paket	0	20 Paket	0	63 Paket	0
				7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	20 Paket	0	20 Paket	0	44 Paket	0
				8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	10 Paket	0	10 Paket	0	24 Paket	0

				9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	30 Paket	0	50 Paket	0	80 Paket	0
				Kegiatan 6 :															
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	140,709,600	100%	250,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	650,000,000	100%	2,540,709,600
				Sub Kegiatan 6 :			140,709,600		250,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		650,000,000		2,540,709,600
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	0
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	140,709,600	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	400,000,000	4 Laporan	1,640,709,600

				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	0
				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000	4 Laporan	900,000,000
				Kegiatan 7 :															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	203,312,700	100%	400,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	1,200,000,000	100%	4,203,312,700
				Sub Kegiatan 7 :			203,312,700		400,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		1,200,000,000		4,203,312,700

				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	203,312,700	4 Unit	200,000,000	5 Unit	400,000,000	20 Unit	400,000,000	20 Unit	400,000,000	20 Unit	600,000,000	73 Unit	2,203,312,700
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	0	4 Unit	200,000,000	100 Unit	400,000,000	100 Unit	400,000,000	100 Unit	400,000,000	100 Unit	600,000,000	100 Unit	2,000,000,000
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit0	0	Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	6 Unit	0
				4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	0	Unit	0	Unit	0	5 Unit	0	5 Unit	0	5 Unit	0	15 Unit	0

				5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	Unit	0	Unit	0	5 Unit	0	5 Unit	0	5 Unit	0	15 Unit	0
				6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	Unit	0	Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	6 Unit	0
				7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	0	Unit	0	Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	6 Unit	0
				9. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	Unit	0	Unit	0	10 Unit	0	6 Unit	0	5 Unit	0	21 Unit	0

				10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	0	Unit	0	Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	6 Unit	0
				Kegiatan 8 :															
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Sub Kegiatan 8 :															
				1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	4 Unit	0

				3. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				6. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0
				7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0
				8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0

				9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0
				10. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				Jumlah Anggaran			9,342,891,802.00		16,300,000,000.00		16,800,000,000.00		16,350,000,000.00		16,350,000,000.00		16,400,000,000.00		91,542,891,802.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur adalah indikator memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Keselarasan ini terletak pada *Misi 3* : **“MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”**, dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan / Pemukiman sehingga tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Timur. Untuk mewujudkan itu maka disusunlah Program

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana kegiatan dan Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, serta Program Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasca Bencana. Yang kemudian ketiga program tersebut kembali disesuaikan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, menjadi Program Penanggulangan Bencana, hal sama diharapkan dari kolaborasi dari tiga kegiatan teknis ini dapat memberikan mitigasi dampak bencana yang ditimbulkan, yaitu dengan mendorong kepada lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk siap dan mandiri terhadap upaya penanggulangan bencana, Untuk mendukung maka BPBD Kabupaten Kutai Timur dengan rencana kerja kegiatan tahap awal melalui **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**, yaitu pada Sub Kegiatan Penyusunan kajian risiko bencana, dan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana** yaitu pada sub Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, **Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan Perka BNPB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, saat tanggap darurat dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana.

Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Utama
2. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Madya
3. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Pratama

Dengan terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana pada desa/kelurahan rawan bencana di Kabupaten Kutai Timur, maka ;

1. Memperkuat Kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dapat terlindungi dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Pemberdayaan masyarakat dan menggali kearifan lokal dalam rangka upaya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Pelibatan semua komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Kemudian dalam upaya pendukung dalam pelaksanaan mitigasi bencana atau upaya antisipasi bencana, pengelolaan data kebencanaan dan dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia menjadi hal utama dan awal untuk dipersiapkan yaitu melalui Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana. Pada kegiatan sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota merupakan tahapan akhir dalam upaya penanganan dampak bencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yaitu pelaksanaan kajian kebutuhan pasca bencana. Selanjutnya kegiatan yang juga menjadi tahap awal yaitu kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu kegiatan yang dikhususkan pada situasi tanggap darurat dengan mengembangkan kemampuan dan Meningkatkan kapasitas daerah baik masyarakat, Organisasi

Perangkat Daerah, BPBD Kutai Timur dan Dunia Usaha dalam mengurangi risiko bencana, dalam Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana. Indikator BPBD Kutai Timur yang selaras dan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1

Penyesuaian Terhadap RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Uraian	Kondisi Awal Kinerja tahun 2021	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	188	185	170	160	150	140	140
2	Nilai Sakip							

BAB VIII

PENUTUP

Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Dokumen Penyempurnaan Renstra BPBD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku penanggulangan bencana di Kalimantan Timur melanjutkan rencana 5 (Lima) tahun kedepan dalam mewujudkan **Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati “**Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**” yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang disesuaikan dengan nomenkatur yang tertera didalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target penanggulangan bencana. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Penyempurnaan Renstra BPBD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas;
2. Penyempurnaan Renstra BPBD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026;
3. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen Renstra dengan Rencana Kerja BPBD, setiap bidang wajib menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Kutai Timur dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L;
4. Dalam pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana, sebagai subyek pelaksana setiap kebijakan serta program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kutai Timur;

6. Kepala Pelaksana melalui bidang bidang lingkup BPBD Kabupaten Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana secara berkala;
7. Peran serta perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

Semoga penyempurnaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.